



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas setiap bulan jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya, dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat pada awal tahun anggaran 2026, diperlukan pengaturan terkait pengeluaran kas mendahului penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

Pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 hanya untuk keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak serta diprioritaskan untuk:

- a. belanja yang bersifat mengikat; dan
- b. belanja yang bersifat wajib.

Pasal 3

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah

dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 4

Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. infrastruktur;
- d. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
- e. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
- f. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
- g. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk mendanai pengeluaran kas direncanakan Rp1.855.403.086.007,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh lima miliar empat ratus tiga juta delapan puluh enam ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja tidak terduga; dan
- c. belanja transfer.

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp1.477.115.007.362,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus lima belas juta tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp796.291.229.809,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp635.180.439.675,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.773.438.878,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.733.399.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.136.500.000,00 (dua belas miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp5.076.676.284,00 (lima miliar tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp178.422.087.602,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.237.087.602,00 (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.185.000.000,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pembiayaan daerah berupa pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp99.488.146.356,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 2 Januari 2026
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG : PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026.

PROVINSI SULAWESI BARAT
RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	1.855.403.086.007,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.477.115.007.362,00
5.1.01	Belanja Pegawai	796.291.229.809,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	505.601.405.140,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	388.021.661.952,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	310.194.629.589,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	77.827.032.363,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	31.624.613.605,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.077.792.583,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.546.821.022,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.731.960.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.731.960.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.207.787.302,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.898.787.302,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	309.000.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.673.421.962,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.236.166.135,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.437.255.827,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	18.750.707.775,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.743.404.918,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.007.302.857,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.002.306.362,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.002.306.362,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.335.608,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.531.675,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.803.933,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	26.569.875.180,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	23.524.494.018,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.045.381.162,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	754.669.245,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	592.332.251,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	162.336.994,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.257.066.149,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.771.235.466,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	485.830.683,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	264.558.639.905,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.204.322.094,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.184.456.805,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	19.865.289,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.828.207.416,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.828.207.416,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	18.685.467,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	18.685.467,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	103.224.439.425,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	103.224.439.425,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	149.282.985.503,00
5.1.01.02.06.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	2.941.236.780,00
5.1.01.02.06.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.296.796.662,00
5.1.01.02.06.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.047.113.448,00
5.1.01.02.06.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok	1.183.624.076,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	130.195.115.257,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.212.162.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.562.500.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.672.157.580,00
5.1.01.02.06.0073	Belanja Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah	172.279.700,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.486.206.447,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	150.399.500,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	150.399.500,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	114.713.280,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	114.713.280,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	122.940.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	122.940.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	174.344.500,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	174.344.500,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	75.951.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	75.951.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.940.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.940.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.485.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.485.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	31.063.087,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	31.063.087,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.835.440.080,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	125.637.840,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.950.560,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.851.680,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.698.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.844.320.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.844.320.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	198.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	198.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.243.378.317,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	77.489.900,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	77.489.900,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.810.400,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.810.400,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	139.482.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	139.482.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.196.135,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.196.135,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.451.986,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.451.986,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.535,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.535,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.858.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.858.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	372.090,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	372.090,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	716.271,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	716.271,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.000.000.000,00
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	235.578.744,00
5.1.01.05.10.0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	230.025.412,00
5.1.01.05.10.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	252.014.160,00
5.1.01.05.10.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok	282.381.684,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.401.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.200.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.200.000.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	716.271,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	716.271,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.000.000.000,00
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	235.578.744,00
5.1.01.05.10.0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	230.025.412,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.10.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	252.014.160,00
5.1.01.05.10.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok	282.381.684,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.401.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.200.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.200.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	635.180.439.675,00
5.1.02.01	Belanja Barang	192.040.223.735,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	191.913.682.935,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.590.042.056,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	574.121.987,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.176.756.614,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.260.078.173,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	472.156.180,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	71.741.600,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	959.065.950,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.047.790.737,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	87.146.995,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	42.012.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.935.520.832,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.565.881.325,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.657.115.223,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	498.800.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	73.013.364,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.748.132.124,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.307.150.536,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	385.565.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.584.752.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.100.751.401,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.117.292.314,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	72.053.293,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	96.523.844.548,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	5.321.644.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	404.252.360,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.544.424.440,00
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	415.904.850,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.347.788.607,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.886.893.830,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.587.000.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	68.600.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.395.669.896,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	410.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	31.750.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	515.250.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.000.980.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	231.250.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	7.410.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	150.880.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	15.750.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	210.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	211.827.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	69.500.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	235.622.400,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	20.788.800,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	17.181.800,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	3.607.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	105.752.000,00
5.1.02.01.04.0037	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	37.110.000,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	80.000,00
5.1.02.01.04.0135	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	11.455.000,00
5.1.02.01.04.0463	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	57.107.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	196.929.339.735,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	150.286.339.823,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	185.290.000,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	41.520.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.232.999.280,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.968.110.736,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	189.800.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	201.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.471.520.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	9.720.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	609.200.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	371.300.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	28.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.147.451.980,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	683.591.872,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.762.280.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.788.080.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	139.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	901.200.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	897.320.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	433.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	28.277.745.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	7.899.340.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.883.016.220,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.395.960.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.757.735.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.111.275.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.365.250.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	33.400.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.071.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	2.432.860.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	528.050.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	19.700.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.367.193.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	13.470.254,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.403.781.096,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	411.000.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	32.200.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	287.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	141.045.600,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	142.065.300,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.899.924.065,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.107.918.040,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.073.872.100,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.606.979.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	34.294.200,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.049.200.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	10.724.500,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0076	Belanja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	2.697.861.500,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	13.500.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.667.946.080,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.380.850.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.651.416.760,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	27.939.860.764,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	398.848.956,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	498.512.928,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	400.000.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	841.455.168,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	572.738.944,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	2.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	2.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.958.695.152,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	851.500.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	981.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.134.420.652,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	562.774.500,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	57.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	115.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	65.500.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	12.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	174.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.358.250.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.125.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	349.700.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	883.550.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	2.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.245.796.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.142.400.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	103.396.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.193.880.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	88.040.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	3.465.880.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	639.960.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.201.162.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.056.390.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	144.772.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	29.300.000,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	8.800.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	20.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.839.227.680,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.691.253.791,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	113.750.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.713.568.081,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.845.213.750,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	748.960.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	190.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.215.919.960,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	704.302.000,00
5.1.02.03.02.0371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	115.000.000,00
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	120.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	563.100.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	112.090.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	39.350.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.205.112.973,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.358.420.973,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	846.692.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	942.860.916,00
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	780.140.735,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	162.720.181,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	58.034.353.793,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.779.105.793,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.081.201.583,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.028.917.986,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.600.428.036,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	68.558.188,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	255.248.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa“Luar Negeri	255.248.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.373.900.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.373.900.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	740.900.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	393.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	9.200.000.000,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0015	Belanja Penyediaan Jaminan Block Seat	2.000.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	82.894.453.000,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	82.894.453.000,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	78.953.703.000,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	3.940.750.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.068.941.732,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.068.941.732,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.068.941.732,00
5.1.03	Belanja Bunga	7.773.438.878,00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	7.773.438.878,00
5.1.03.01.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	7.773.438.878,00
5.1.03.01.06.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	7.773.438.878,00
5.1.05	Belanja Hibah	25.733.399.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.325.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.105.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.105.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.220.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.220.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	500.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	500.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.500.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.500.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	15.118.412.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	12.374.862.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	12.374.862.000,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.743.550.000,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.743.550.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.289.987.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.289.987.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.289.987.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.136.500.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	152.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	152.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	152.500.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	10.044.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	10.044.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	10.044.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.340.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.340.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.340.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	600.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	600.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	600.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.076.676.284,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.076.676.284,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.076.676.284,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.076.676.284,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.076.676.284,00
5.4	BELANJA TRANSFER	178.422.087.602,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	163.237.087.602,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	163.237.087.602,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	163.237.087.602,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	163.237.087.602,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	15.185.000.000,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	300.000.000,00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	300.000.000,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	300.000.000,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	5.300.000.000,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	5.300.000.000,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	5.300.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	9.585.000.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	9.585.000.000,00
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	9.585.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.855.403.086.007,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	99.488.146.356,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	99.488.146.356,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	99.488.146.356,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	99.488.146.356,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	99.488.146.356,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	99.488.146.356,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	99.488.146.356,00

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003